

pemerintah juga perlu meninjau apakah aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat mempengaruhi pertanggungjawaban kinerja pemerintah sendiri. Hal inilah yang membuat sehingga ketaatan pada peraturan perundangan di OPD Kabupaten Mimika yang menyebabkan hasilnya tidak berpengaruh. Untuk itu, Pemerintah perlu meningkatkan pengetahuan pegawai tentang peraturan perundangan agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Mimika menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasibuan (2018) yang menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kinasih (2018) yang menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, transparansi publik, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai/pejabat pada 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mimika dengan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling*, kemudian diperoleh 113 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran(X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Mimika.
- 5.1.2. Variabel Sistem Pengendalian Internal(X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Mimika.
- 5.1.3. Variabel Transparansi Publik (X3) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Mimika.
- 5.1.4. Variabel Ketaatan pada peraturan perundangan (X4) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Mimika.

Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan dalam bab 1 yaitu untuk menguji kembali pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, transparansi publik, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan subjek berbeda dengan penelitian terdahulu. Hasil uji koefisien determinasi dengan nilai adjusted R Square sebesar 0,521 atau 52,1%. Hal ini menyatakan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependennya. Sedangkan, 48% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Hasil pengujian yang sejalan dengan hipotesis pada penelitian ini dapat membuktikan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di Mimika seperti kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS), dana pembangunan gereja Kingmi mile 32 serta kasus-kasus lainnya di Mimika yang menunjukkan bahwa transparansi publik dan ketaatan pada peraturan perundangan perlu diperhatikan lagi karena variabel ini tidak berpengaruh pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Apabila tidak diterapkan, maka akan timbul masalah dalam hal penggunaan anggaran yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan akuntabilitasnya. Dengan adanya penerapan tindakan hukum yang tegas untuk aparat pemerintah, dan penjaminan bahwa publik dapat mengakses dokumennya sewaktu-waktu maka akan tercipta pelaporan

pertanggungjawaban kepada masyarakat dan semua pihak yang membutuhkan sehingga hasil penilaian SAKIP dapat meningkat.

5.2. Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak keterbatasan dalam penyusunannya. Keterbatasan tersebut antara lain:

5.2.1. Kesulitan untuk mengumpulkan kembali kuesioner mengingat kesibukan responden. Dari 120 kuesioner yang disebar hanya terkumpul 113 dan 7 diantaranya tidak dikembalikan karena peneliti kesulitan untuk menghubungi yang bersangkutan dan ini yang menyebabkan lamanya pengumpulan data. Serta jarak antar lokasi kantor OPD yang satu dengan yang lainnya cukup jauh yang menyebabkan pengumpulan data membutuhkan waktu yang lama.

5.2.2. Subjek penelitian ini terbatas pada aparatur pemerintah di OPD Kabupaten Mimika, sehingga terdapat perbedaan hasil penelitian apabila dilakukan pada subjek yang berbeda.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan lain antara lain:

5.3.1. Bagi Pemerintah Kabupaten Mimika

Pemerintah perlu meninjau apakah aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat mempengaruhi pertanggungjawaban kinerja pemerintah, serta diharapkan

untuk meningkatkan ketepatan dalam menentukan sasaran anggaran dan efektivitas dalam penerapan pengendalian Internal di lingkungan pemerintah. Selain itu juga harus memperbaiki sistem pelaporan agar menjadi lebih baik serta meningkatkan pengetahuan pegawai tentang peraturan perundangan agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Mimika menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

5.3.2. Bagi peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis dapat melakukan penelitian pada objek berbeda untuk membuktikan kekonsistenan hasil penelitian. Untuk peneliti selanjutnya juga dapat lebih memperhatikan waktu untuk penyebaran kuesioner untuk mencegah kuesioner yang hilang akibat tertumpuk dengan berkas yang mengakibatkan kuesioner lama untuk dikembalikan. Selain itu, jika ingin melakukan penelitian yang serupa diharapkan dapat mengganti beberapa variabel pada penelitian ini untuk diuji kembali kekonsistenan pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Cantika, Y. (2018). *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Committee of Sponsoring Organizations. (2013). *Internal Control-integrated framework, executive summary*. Durham, North California, May 2013
- Ellwood, S. (1993). Parish and Town Councils: Financial Accountability and Management. *Local Government Studies*, 19, 368–386.
- Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran. (2015). *Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran*. seknasfitra.org.
<https://seknasfitra.org/korupsi-sudah-terjadi-sejak-perencanaan-anggaran/>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibor, N. (2021). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Transparansi Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Klaten*. Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Edisi 5). BPF.
- Hasibuan, J. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah,*

Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada SKPD Padang Lawas). Skripsi: Universitas Sumatera Utara Medan.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Kenis, I. (1979). Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *Journal the Accounting Review*, 54, 707.

Kinasih, H. (2018). *Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang.

Locke, Edwin A; Latham, G. P. (1984). Goal Setting-A motivational technique that works. *Journal Organizational Dynamics*, 68–80.

Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

_____. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

_____. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Nurdin, I., Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

- Nurina; Yahya, M. R. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah, 1*, 128–142.
- Pakpahan, M. (2021). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kantor BPKD Kota Pematangsiantar)*. Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Rankin, M., Stanton, P., McGowan, S., Ferlauto, K., Tilling, M. (2012). *Contemporary Issues in Accounting*. New York: John Wiley & Sons.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Rosjidi. (2001). *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standar dan Metode*. Surabaya: Aksara Satu.
- Samuel, A. T. (2008). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi sebagai variabel intervening pada Kawasan Industri Medan*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara

Silalahi, E. (2017). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel moderating pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara Medan.

Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat*. Malang: Malang Setara Press.

Solihin, D. (2007). *Indikator Governance dan Penerapannya Dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung: BAPPENAS.

Wasistiono, S. (2007). *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*. Jakarta: LIPI Press.